

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dalam Bab 5, maka dapat disimpulkan:

1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan Kota Padang Panjang selama tahun 2007-2009 yang dilihat melalui dokumen RKPD dan APBD Kota Padang Panjang Tahun 2007-2009 memperlihatkan tingkat konsistensi yang relatif rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan bidang pendidikan yang sebelumnya direncanakan dalam RKPD tetapi tidak diakomodir dalam APBD, begitu juga dengan banyaknya kegiatan bidang pendidikan yang sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD tetapi tiba-tiba muncul dalam APBD. Artinya terdapat kecenderungan pada pemerintah Kota Padang Panjang dalam menyusun penganggaran bidang pendidikan yang tidak memperhatikan kebijakan perencanaan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Tingkat konsistensi penyusunan kegiatan bidang pendidikan dalam APBD Kota Padang Panjang tahun 2007 terhadap perencanaan di RKPD adalah sebesar 66,7%. Artinya hanya sebesar 66,7% kegiatan yang dianggarkan APBD 2007 yang sebelumnya direncanakan dalam RKPD, selebihnya kegiatan dalam APBD 2007 tersebut tidak direncanakan dalam RKPD. Kemudian pada tahun 2008 tingkat konsistensi penyusunan kegiatan yang ada di APBD terhadap RKPD 2008 menurun tajam menjadi 47,7%. Artinya lebih dari separo kegiatan bidang pendidikan yang ditampung dalam APBD 2008 sebelumnya tidak direncanakan dalam RKPD 2008. Terakhir pada tahun 2009, tingkat konsistensi penyusunan kegiatan bidang pendidikan di APBD terhadap RKPD 2009 menunjukkan angka yang meningkat dari tahun 2008 walaupun angka ini masih tergolong rendah yaitu sebesar 63%.
3. Jika dikaitkan dengan tingkat pencapaian indikator kinerja daerah di bidang pendidikan, yaitu indikator yang disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah sesuai visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan, maka konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan di Kota

Padang Panjang ternyata mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan pendidikan yang ditetapkan daerah. Artinya dengan adanya konsistensi yang tinggi antara perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan, maka sasaran pembangunan daerah relatif tercapai. Sebaliknya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan menyebabkan sasaran pembangunan bidang pendidikan tersebut tidak tercapai.

4. Jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, ternyata konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan tersebut menyebabkan kinerja pendidikan di Kota Padang Panjang yang dilihat melalui SPM menjadi rendah dan sebaliknya inkonsistensi perencanaan dan penganggaran bidang pendidikan menyebabkan kinerja pendidikan menjadi lebih tinggi. Artinya perencanaan yang disusun sebelumnya ternyata tidak mendukung pencapaian kinerja SPM.
5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja perencanaan pendidikan di Kota Padang Panjang belum begitu baik terlihat dari penyusunan sasaran pembangunan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang yang ternyata tidak mendukung pencapaian kinerja menurut Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan. Atau dengan kata lain penyusunan perencanaan pendidikan di Kota Padang Panjang ternyata tidak mengacu pada kebijakan nasional di bidang pendidikan.

## **6.2 Saran**

1. Penyusunan penganggaran di bidang pendidikan agar konsisten dengan perencanaan yang ada agar sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen perencanaan tersebut dapat tercapai.
2. Namun penyusunan perencanaan khususnya perumusan sasaran pembangunan bidang pendidikan beserta dengan perencanaan program dan kegiatan bidang pendidikan tersebut hendaknya juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional.

3. Pemerintah Kota Padang Panjang sebaiknya memperbaiki kinerja perencanaan pendidikan agar perencanaan tersebut benar-benar mengakomodir permasalahan pendidikan yang ada serta mendukung dan sinkron dengan kebijakan nasional di bidang pendidikan.

